

**ARAHAN PERWILAYAHAN KOMODITAS PERTANIAN SEBAGAI
DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH
DI KABUPATEN SEMARANG**

TUGAS AKHIR

Oleh:

DONI PRASETYOADI

L2D 000 411



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**

ARAHAN PERWILAYAHAN KOMODITAS PERTANIAN SEBAGAI DASAR PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

Oleh : Doni Prasetyoadi

Abstrak :Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sebutan negara agraris. Dengan sebutan negara agraris dapat diketahui bahwa sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pertanian. Hampir sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia bekerja pada sektor pertanian seperti petani baik yang penggarap maupun pemilik dari lahan pertanian itu sendiri, ataupun bekerja pada organisasi, badan-badan yang berkecimpung di dalam sektor pertanian. Kenyataan yang berjalan di Indonesai menimbulkan kesan bahwa sebutan negara agraris dirasa kurang sesuai dengan kondisi lapangan. Hal ini dikarenakan sektor non pertanian justru mendapat tempat diatas sektor pertanian itu sendiri. Pertanian dianggap sebagai sebuah sektor yang kurang menguntungkan.Di dalam tataran normatif seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Keberadaan pertanian sebagai sebuah aktivitas kurang mendapat perhatian yang khusus dibanding aktivitas yang lain. Kondisi ini dapat terlihat dalam perwilayahan komoditas, aktivitas pertanian kurang mendapat sorotan yang lebih mendetail mengenai jenis pertanian pada tataran Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak adanya kejelasan mengenai jenis komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di suatu lahan pada tataran Rencana detail tata ruang.Kabupaten Semarang sebagai salah satu waeah pertanian di Pulau Jawa secara regional memiliki pertumbuhan perekonomian yang didominasi oleh sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan Hortikultura. Namun sektor pertanian kurang dapat memberikan nilai tambah bagi pelaku pertanian. Merespon dari hal ini diperlukan perbaikan kinerja sektor pertanian secara komprehensif meliputi kegiatan produksi dan pasca produksi.

Respon tersebut dapat diimplementasikan ke dalam perwilayahan komoditas pertanian Peran dari perwilayahan komoditas adalah bagaimana mengarahkan pola komoditas pertanian sehingga dapat mengoptimalisasi guna lahan pertanian.Perwilayahan Komoditas pertanian yang akan dikembangkan menyangkut aspek pemasaran, kelembagaan, infrastruktur, dan kesiapan sumber daya manusia. Aspek kelembagaan, sumber daya manusia dan infrastruktur merupakan komponen-komponen pembentuk tipologi perwilayahan komoditas pertanian sebagai dasar pengembangan kawasan pertanian dalam pengembangan ekonomi wilatah

Metode yang digunakan dalam perwilayahan komoditas ini adalah dengan menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis yang berfungsi mengintegrasikan antara data spasial dan tekstual. Melalui teknologi ini diharapkan muncul perwilayahan komoditas sebagai informasi dasar komoditas yang dapat dikembangkan. Batasan dalam perwilayahan komoditas ditentukan dengan melakukan perhitungan LQ dan shif share dari sub sektor pertanian yang dikomparasikan dengan kebijakan pertanian dan penggunaan lahan pertanian. Metode berikutnya adalah metode deskriptif terhadap komponen pendukung pertanian yang meliputi kelembagaan, sumber daya manusia dan infrastruktur pertanian yang kesemuannya membentuk karakteristik masing-masing komponen. Berbagai karakteristik tersebut tergabung dan dibandingkan dengan wilayah komoditas akan menjadi sebuah tipologi perwilayahan komoditas sebagai hasil akhir yang diharapkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Tipologi Perwilayahan Komoditas

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terkenal dengan sebutan negara agraris. Dengan demikian sektor yang menjadi unggulan adalah sektor pertanian. Hampir sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia bekerja pada sektor pertanian seperti petani baik yang penggarap maupun pemilik dari lahan pertanian itu sendiri, atau bekerja pada organisasi dan badan-badan yang berkecimpung di dalam sektor pertanian (BPS,2002). Akan tetapi kenyataan di Indonesia mengesankan bahwa sebutan negara agraris dirasa kurang sesuai dengan kondisi lapangan, karena pertanian dianggap sebagai sektor yang kurang menguntungkan.

Kebijakan-Kebijakan pembangunan di Indonesia lebih mengarah pada pemanfaatan sektor non pertanian dengan maksud mendorong atau menopang sektor pertanian. Tetapi kebijakan tersebut pada akhirnya berjalan tidak seperti yang digariskan dan sektor pertanian tetap tidak mengalami perkembangan yang signifikan (Utomo et al: 1994 hal: 23). Perlu disadari bahwa sejak awal proses pembangunan (awal orde baru) negara Indonesia berada dalam dilematika konsep pembangunan dalam hal ini tidak adanya ketegasan prioritas pembangunan sektoral. Konsep yang ditetapkan pada waktu itu adalah “..Pembangunan industri yang bertumpu pada sektor pertanian...”. Konsep tersebut diterapkan karena pada awalnya negara indonesia berusaha untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi secara cepat dengan menggunakan basis sektor pertanian. Kondisi yang terjadi terhadap kedua sektor yaitu industri dan pertanian pada akhirnya kurang dapat berjalan secara bersama saling mengisi, bahkan industri yang berkembang merupakan industri non pertanian (industri berat yang lebih banyak tidak didukung dengan kesiapan sumber daya yang ada). Industri pertanian (agroindustri) tertinggal jauh dari sektor industri non pertanian. Sektor Industri non pertanian memang pada awalnya dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetapi tidak ada kesiapan sumber daya yang memadai sehingga pada waktu terjadinya krisis ekonomi di Indonesia sektor inilah yang pertama kali mengalami kehancuran. Sektor pertanian dalam suasana krisis ekonomi secara umum merupakan sektor yang stabil dari berbagai goncangan kisis ekonomi. Sumbangan

sektor pertanian dari tahun ketahun terhadap Pendapatan Regional Bruto tidak mengalami fluktuasi yang tajam¹

Kondisi krisis ekonomi yang melanda negara Asia Tenggara termasuk Indonesia semakin membuat sektor pertanian semakin tidak tersentuh oleh pembangunan. Pemerintah tetap disibukkan dengan upaya mendongkrak kembali ekonomi dengan sektor industri yang sudah terlihat jelas terpuruk. Apabila kita mau belajar dari pengalaman negara lain yaitu Thailand yang sedikit demi sedikit dapat lepas dari krisis ekonomi yang dikarenakan secara konsisten dan tegas menggunakan potensi dasar yang dimiliki yaitu pertanian.

Dualisme konsep pembangunan antara sektor pertanian dan sektor industri menyebabkan pertanian kurang mendapat perhatian dan dukungan dari pemerintah. Salah satu akibat dari kondisi ini adalah menjadi kurangnya informasi untuk petani tentang komoditas pertanian. Seperti diuraikan sebelumnya kebijakan pemerintah tentang pertanian antara lain adalah kebijakan yang berorientasi pada produksi. Implikasi kebijakan tersebut adalah adanya penyediaan sarana produksi yang melimpah. Kebijakan yang berorientasi produksi membawa petani untuk menanam komoditas dengan saprodi yang disediakan pemerintah. Aspek fisik lahan dan kesesuaian lahan yang spesifik untuk komoditas kurang diperhatikan. Akibat dari hal ini besaran produksi pertanian melimpah dan membuat nilai komoditas pertanian menjadi rendah dan tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi. Disisi lain pada tahap pasca panen tidak ada mekanisme harga yang jelas tindak lanjut dari pemerintah setelah menetapkan harga dasar produk pertanian. Mekanisme pemasaran produk pertanian sendiri juga didominasi oleh adanya sistem ijon yang sangat merugikan petani sebagai pihak paling lemah posisi tawarnya dalam pertanian. Kelembagaan pertanian yang ada tidak terorganisir dengan baik (Utomo et al: 1994 hal: 22).

Sektor pertanian sulit untuk maju dan berkembang sehingga juga tidak dapat diandalkan untuk mengangkat taraf hidup petani. Pilihan terakhir adalah melakukan konversi lahan pertanian ke non pertanian dan berakibat hilangnya lahan-lahan produktif untuk pertanian (Sugianto dalam Utomo et al: 1994 hal: 23).

Berdasarkan pemikiran tersebut adanya suatu usaha yang dapat menciptakan suatu peluang terhadap pertanian untuk maju dan berkembang. Pengembangan pertanian dapat dilakukan dengan partisipasi petani dalam artian petani tidak hanya menjadi

¹ Dikutip dari pernyataan Prof Dr Muhajir Utomo dalam Kompas.com tanggal 22 Agustus 2000

penanam saja tetapi dapat menentukan sendiri apa yang akan mereka kembangkan dengan pertanian. Pertanian tidak hanya sekedar bercocok tanam tetapi juga usaha yang dilakukan setelah masa panen terhadap hasil panennya (Utomo dalam Kompas.com).

Pertanian yang berkembang di Indonesia belum bersifat *Inovation driven* sehingga dengan demikian diperlukan adanya penggalan IPTEK untuk mendukung pertanian di Indonesia. Pengembangan teknologi tersebut dapat diwujudkan dengan beberapa penelitian di bidang pertanian antara lain (Hanani AR et al: 2003, hal: 86):

1. Penelitian mengenai komoditas pertanian, yang menyangkut komoditas yang sesuai dengan potensi wilayah.
2. Penelitian mengenai rekayasa teknologi pertanian (bioteknologi pertanian)
3. Penelitian mengenai sosial ekonomi pertanian dan kebijakan pertanian.
4. Pengembangan mengenai teknologi spesifik lahan pertanian di suatu wilayah.
5. Penelitian mengenai pasca panen dan diversifikasi produk pertanian.

Berdasarkan uraian diatas selama ini pertanian di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada usaha-usaha tersebut. Sebagai contoh dalam rangka peningkatan kegiatan usaha tani yang perlu diperhatikan dalam aspek produksi adalah aspek komoditas yang sesuai dengan potensi wilayahnya (Hanani AR et al: 2003 hal: 77). Di sisi lain, didalam tataran normatif keberadaan pertanian sebagai sebuah aktivitas kurang mendapat perhatian yang khusus dibanding aktivitas yang lain. Kondisi ini dapat terlihat dalam aktivitas pertanian yang kurang mendapat sorotan yang lebih mendetail mengenai jenis pertanian pada tataran Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak adanya kejelasan mengenai jenis komoditas yang sesuai untuk dikembangkan di suatu lahan pertanian. Sehingga perlu diadakannya penelitian mengenai pengidentifikasian potensi fisik lahan yang menghasilkan kesesuaian lahan untuk komoditas pertanian Dengan demikian dalam suatu wilayah kabupaten dapat dikembangkan komoditas-komoditas pertanian yang mempunyai kecocokan syarat tumbuh terhadap lahan yang ada. Pengembangan komoditas sesuai dengan fisik lahan hendaknya juga menyinggug terhadap aspek sosial yang ada meliputi sumber daya manusia, kelembagaan dan aspke pasca panen/pemasaran komoditas pertanian.